BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER TENTANG KONSEP KEADILAN SAKSI SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN AKAD NIKAH

A. Pendapat Ulama Kontemporer Mengenai Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah

Dalam hukum Islam kontemporer, keberadaan saksi dalam akad nikah tidak hanya dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum terhadap institusi pernikahan. Saksi berfungsi sebagai penjaga keabsahan akad dan sebagai instrumen perlindungan terhadap potensi sengketa di masa mendatang. Oleh karena itu, salah satu syarat penting dari sahnya saksi dalam akad nikah adalah sifat keadilan. Namun, keadilan ini tidak selalu dipahami secara tekstual, melainkan telah mengalami reformulasi makna oleh para ulama kontemporer menjadi lebih proporsional, kontekstual, dan fungsional.

Ulama kontemporer melihat bahwa syarat keadilan saksi dalam akad nikah tidak boleh menjadi penghalang substansi akad, selama prinsip-prinsip moralitas dasar terpenuhi. Salah satu tokoh penting yang mengembangkan pendekatan ini adalah Wahbah Az-Zuhaili. Dalam karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ia menyatakan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan kewajiban yang disepakati oleh para ulama, karena berfungsi sebagai bentuk dokumentasi, penguatan hak-hak, serta pencegahan terhadap kemungkinan

terjadinya sengketa di masa mendatang. Namun, ia memberikan pemaknaan yang lebih longgar terhadap keadilan. Menurutnya:

العدالة لا تعني المثالية المطلقة، بل الاستقامة الظاهرة وترك الكبائر وعدم الإصرار على

الصغائر⁷²

“Keadilan tidak berarti kesempurnaan mutlak, tetapi kelurusan yang tampak, meninggalkan dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.”⁷³

Az-Zuhaili berpandangan bahwa seseorang yang tidak dikenal melakukan dosa besar secara terang-terangan, tidak secara rutin mengerjakan perbuatan tercela, dan memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat, sudah cukup untuk dianggap sebagai saksi yang adil. Pendekatan ini memperlihatkan adanya titik temu antara tuntutan normatif hukum Islam dan kenyataan sosial masyarakat kontemporer. Ia menolak pendekatan yang terlalu perfeksionis dalam menilai moralitas individu, karena akan menyulitkan umat Islam untuk melaksanakan akad nikah secara sah. Prinsip yang digunakan Az-Zuhaili adalah prinsip *al-taysīr* (memberikan kemudahan), yakni hukum Islam harus dijalankan dengan cara yang tidak memberatkan umat, selama tidak melanggar esensi syariat.

Senada dengan itu, Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Awlawiyyat* dan *Fiqh al-Mu‘āshir*, menekankan bahwa hukum Islam harus mampu menyeimbangkan antara teks syar’i dan realitas sosial. Ia menyatakan secara eksplisit bahwa:

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 137.

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Dalil-Dalilnya* (terj. Saiful Mujani dkk.), Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 137.

العدالة المطلوبة في الشهود هي العدالة الظاهرة في السلوك العام، لا العدالة المثالية التي

قد لا تتوفر إلا في القليل من الناس⁷⁴

“Keadilan yang disyaratkan dalam saksi adalah keadilan yang tampak dalam perilaku umum, bukan keadilan ideal yang mungkin hanya tersedia pada segelintir orang.”⁷⁵

Pendekatan ini mencerminkan pemikiran al-Qardhawi yang sangat menekankan bahwa tujuan utama syariat (*Maqāṣid al-syarī‘ah*) harus menjadi acuan utama dalam menetapkan hukum. Jika syarat keadilan dimaknai terlalu sempit atau terlalu berat, maka hal tersebut berpotensi menghalangi pernikahan sah yang pada dasarnya sangat dianjurkan oleh syariat.

Menurut al-Qardhawi, masyarakat harus dijadikan ukuran utama dalam menilai keadilan. Seorang saksi dianggap adil apabila dalam pandangan masyarakat ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan tidak melakukan maksiat secara terbuka. Dengan pendekatan ini, syarat keadilan tidak menjadi beban, tetapi justru menjadi jaminan sosial bahwa akad nikah berlangsung dengan saksi yang pantas secara moral dan sosial. Ia juga mengingatkan bahwa hukum yang terlalu kaku dan hanya berpegang pada lafaz nash, tanpa memperhatikan konteks sosial, akan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, fiqh harus bersifat dinamis dan mampu menjawab kebutuhan serta persoalan yang berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu, Muhammad Abu Zahrah sebagai seorang ulama kontemporer yang sangat peduli dengan penguatan *Maqāṣid al-syarī‘ah* dalam

⁷⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Mu‘āshir* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 215.

⁷⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Kontemporer*, terj. As‘ad Yasin, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 213.

sistem hukum Islam, memberikan definisi keadilan saksi yang sangat sosial dan proporsional. Dalam *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah*, ia menulis:

العدالة في الشهادة ليست كامالا شخصيا، بل هي استقامة تظهر في التعامل مع الناس،
ويُعرف بها صاحبها⁷⁶

“Keadilan dalam kesaksian bukanlah kesempurnaan pribadi, tetapi kelurusan yang tampak dalam interaksi sosial, dan dikenal oleh orang-orang di sekitarnya.”⁷⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Abu Zahrah sangat menekankan aspek sosial dari keadilan saksi. Menurutnya, selama seseorang tidak dikenal sebagai pelaku perbuatan tercela secara publik, memiliki perilaku baik dalam masyarakat, dan dapat dipercaya, maka ia sudah memenuhi syarat keadilan.

Pendekatan Abu Zahrah sangat penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan tidak memberatkan umat. Dalam pandangannya, hukum Islam harus mampu menjadi solusi atas problematika umat, bukan menjadi hambatan. Oleh karena itu, persyaratan *keadilan* saksi harus diformulasikan ulang sebagai sarana untuk menjaga martabat akad nikah, dan bukan sebagai tembok penghalang yang menutup pintu bagi orang-orang yang hendak membangun rumah tangga yang sah.

Jika dikaitkan dengan praktik sosial di Indonesia, maka pemikiran ulama kontemporer ini memberikan arah baru dalam memahami persyaratan hukum pernikahan. Dalam kenyataan di lapangan, banyak pernikahan yang hanya menghadirkan saksi berdasarkan status sosial, jabatan, atau kedekatan personal,

⁷⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Mu'āshir* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 215.

⁷⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 215.

tanpa verifikasi terhadap integritas moralnya. Misalnya, seseorang bisa saja diangkat menjadi saksi hanya karena ia adalah tokoh masyarakat atau aparat desa, padahal tidak ada jaminan bahwa ia memiliki kepribadian yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, pendekatan keadilan sosial sebagaimana dirumuskan oleh Az-Zuhaili, al-Qardhawi, dan Abu Zahrah menjadi sangat relevan. Saksi tidak cukup hanya hadir secara administratif, tetapi harus memiliki kualitas moral yang diakui secara sosial sebagai orang yang jujur, amanah, dan tidak melakukan maksiat terang-terangan.

Pendekatan yang ditawarkan ulama kontemporer ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam di Indonesia yang bertujuan menjaga kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Meski Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 25 hanya menyebutkan keharusan dua orang saksi, namun tidak mengatur secara eksplisit mengenai keadilannya. Maka, pendekatan ulama kontemporer dapat menjadi kerangka interpretasi terhadap ketentuan tersebut, sehingga hukum positif Indonesia dapat diisi dengan nilai-nilai substansial dari syariat Islam yang hidup dan adaptif terhadap konteks sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ulama kontemporer mengarahkan pemahaman keadilan saksi pada kerangka sosial dan maslahat, bukan pada kesempurnaan moral individu yang idealis. Selama saksi dikenal baik oleh masyarakat, memiliki integritas dalam pergaulan umum, dan tidak terlibat dalam perilaku yang mencoreng nama baiknya secara terbuka, maka ia sudah memenuhi syarat keadilan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan keberanian dalam melakukan ijtihad hukum, tetapi juga menunjukkan perhatian mendalam para

ulama terhadap keseimbangan antara teks dan konteks, antara hukum dan kemanusiaan, antara legalitas dan legitimasi sosial.

B. Analisis Pendapat Ulama Kontemporer Mengenai Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari'ah

. Pendekatan *Maqāshid al-syarī'ah* dalam memahami hukum Islam menjadi instrumen penting yang digunakan oleh ulama kontemporer untuk menjaga relevansi ajaran Islam terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman. *Maqāshid al-syarī'ah* adalah teori yang menekankan bahwa di balik setiap ketentuan hukum terdapat tujuan-tujuan luhur yang ingin diwujudkan, seperti menjaga agama (*Hifz al-Dīn*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Māl*). Dalam konteks keadilan saksi pada akad nikah, *Maqāshid* yang paling relevan adalah menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan menjaga agama (*Hifz al-Dīn*), karena saksi berfungsi untuk mengesahkan dan menjamin kesucian pernikahan serta menghindarkan masyarakat dari kekacauan nasab dan moralitas.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan Jasser Auda memandang bahwa syarat keadilan bagi saksi tidak boleh dilihat sekadar sebagai bentuk kepatuhan formal terhadap teks hukum, melainkan harus ditinjau dalam kerangka tujuan-tujuan syariat. Dalam hal ini, kehadiran saksi yang adil dipahami sebagai sarana untuk menjaga integritas dan keabsahan akad nikah di mata Allah, masyarakat, dan negara. Apabila persaksian hanya menjadi formalitas semata tanpa memperhatikan dimensi moral dan sosial, maka akan

terjadi penyimpangan dari *Maqāṣid*-nya, yakni hilangnya perlindungan terhadap keluarga dan nasab.

Yusuf al-Qardhawi dalam *Dirāsāt fī Fiqh al-Maqāṣid* menegaskan bahwa *Maqāṣid* merupakan fondasi penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual. Ia menyatakan bahwa:

"Syariat Islam tidak bertujuan untuk menyulitkan manusia dengan aturan yang berat, tetapi untuk mewujudkan manfaat terbesar dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia."⁷⁸

Pernyataan ini memberikan dasar bahwa hukum yang menetapkan syarat keadilan bagi saksi seharusnya tidak dimaknai dengan beban yang memberatkan sehingga sulit terpenuhi, apalagi jika dipahami secara rigid dan tidak memperhitungkan realitas sosial. Dalam perspektif *Maqāṣid*, keadilan saksi seharusnya diarahkan untuk menjamin kejelasan dan legitimasi suatu akad nikah, serta melindungi dari kemungkinan manipulasi dan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, orientasi utamanya adalah pada pencapaian kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-‘āmmah*), bukan semata-mata kepatuhan literal terhadap teks hukum.

Saksi yang adil juga memiliki kaitan erat dengan *Hifẓ al-Dīn* dan *Hifẓ al-Nasl*, yaitu menjaga agama dan keturunan. Jika kesaksian dalam akad nikah diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki reputasi baik dan tidak bisa dipercaya oleh masyarakat, maka akan timbul keraguan terhadap keabsahan akad itu sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan persoalan serius seperti ketidakpastian status pernikahan dan anak keturunan, yang tentu

⁷⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Studi Kritis Maqashid Syariah: Antara Teori dan Praktik (Dirāsāt fī Fiqh al-Maqāṣid)*, terj. Masyhur Abadi, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020, hlm. 52.

saja bertentangan dengan nilai-nilai *Maqāṣid*. Oleh karena itu, penting memastikan bahwa saksi memiliki reputasi sosial yang baik, sehingga tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan kesucian pernikahan dapat tercapai secara optimal.

Lebih jauh, Jasser Auda dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan kontekstual terhadap *Maqāṣid*. Ia mengembangkan enam dimensi pemahaman *Maqāṣid*, salah satunya adalah dimensi fleksibilitas dan dinamika konteks sosial. Auda menyatakan:

"*Maqāṣid* bukanlah sekadar alat pembacaan hukum, tetapi merupakan filosofi hukum Islam yang bertujuan membawa rahmat, keadilan, dan relevansi terhadap realitas kehidupan umat."⁷⁹

Pandangan Auda sangat penting dalam mereformulasi cara kita memaknai keadilan saksi. Jika pemaknaan keadilan hanya diletakkan dalam kerangka tekstual, maka ia akan kehilangan daya aplikatif dalam masyarakat yang plural dan terus berubah. Sebaliknya, jika keadilan dilihat sebagai sarana untuk menjamin tercapainya maslahat sosial dengan menilai reputasi publik, kejujuran, dan integritas saksi maka *Maqāṣid* hukum akan lebih mudah diwujudkan. Dalam hal ini, pendekatan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili menjadi sangat relevan, karena mereka memformulasikan kriteria keadilan secara kontekstual namun tetap menjaga nilai dasar syariah.

⁷⁹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 37.

Sebagai contoh aplikatif, dalam banyak praktik pernikahan di Indonesia, terutama di pedesaan atau wilayah administrasi yang minim edukasi hukum, saksi seringkali diambil dari perangkat RT, tokoh lokal, atau bahkan tetangga terdekat. Mereka tidak diteliti lebih jauh mengenai kualitas moralnya, melainkan hanya hadir secara administratif. Bila keadilan hanya dimaknai dalam bentuk kehadiran fisik atau formalitas, maka hal ini bertentangan dengan *Maqāṣid*, karena tidak memberikan perlindungan yang substansial terhadap akad nikah. Maka, perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan lembaga agama untuk memverifikasi kelayakan saksi secara sosial dan moral, agar fungsi kesaksian sebagai penjaga kemaslahatan akad benar-benar terwujud.

Lebih jauh, pendekatan *Maqāṣid* juga menolak bentuk formalitas yang menghilangkan tujuan hukum. Yusuf al-Qardhawi menyatakan dalam *Fiqh al-Awlawiyyat* bahwa:

"Banyak orang terjebak dalam bentuk (ṣūrah), tetapi melupakan hakikat dan maksud (maqṣūd) dari hukum itu sendiri. Padahal Islam datang untuk menjamin maslahat, bukan sekadar mengikat umat pada prosedur kosong."⁸⁰

Dengan merujuk pada pandangan ini, keadilan saksi tidak bisa dipahami sekadar sebagai syarat teknis kehadiran dua orang dalam akad, tetapi harus dilihat sebagai jaminan terhadap tercapainya nilai-nilai *Maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam konteks ini, ketika saksi memiliki integritas yang dikenal secara sosial, maka ia telah memenuhi maqṣūd dari keadilan itu sendiri. Sebaliknya, jika saksi hanya sekadar hadir tanpa memiliki kualitas moral yang layak, maka

⁸⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Prioritas: Sebuah Studi Baru dalam Fikih Islam*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 29.

kehadirannya tidak akan mewujudkan *Maqāṣid*, bahkan berpotensi menimbulkan kerusakan (mafsadah).

Pemikiran-pemikiran ini menunjukkan bahwa *Maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya alat teoritis dalam hukum Islam, melainkan kerangka nilai yang hidup dan mengatur bagaimana hukum dijalankan dalam masyarakat. Ketika ulama kontemporer mengarahkan syarat keadilan saksi kepada aspek reputasi sosial, kejujuran, dan kepercayaan publik, sesungguhnya mereka sedang membumikan *Maqāṣid* itu sendiri. Dengan demikian, keadilan tidak diposisikan sebagai beban hukum, tetapi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan syariat terhadap lembaga pernikahan.

Sebagai simpulan, pendekatan *Maqāṣid* memberikan landasan yang kokoh bahwa keadilan saksi harus ditafsirkan dalam kerangka substansial, bukan sekadar formal. Para ulama kontemporer mengarahkan interpretasi ini agar hukum pernikahan tetap terhubung dengan realitas sosial, tanpa kehilangan nilai spiritual dan etikanya. Dengan mempertimbangkan *Maqāṣid*, maka pemilihan saksi dalam akad nikah menjadi bagian dari upaya kolektif umat Islam untuk menjaga keberkahan pernikahan, stabilitas keluarga, dan kehormatan masyarakat.